



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DAERAH TANGGUH BENCANA

**Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
(PDTu)**

**SEMINAR NASIONAL
PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PR-BBK)
GEDUNG BAKORWIL II GRHA SOLO RAYA
16 OKTOBER 2015**

KERANGKA PAPARAN

1 PENDAHULUAN

2 KONTEKS KERENTANAN BENCANA DI INDONESIA

3 MAPPING INDEKSASI KEBENCANAAN

4 JENIS ANCAMAN DAN SPESIFIKASI MENU

5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENANGGULANGAN BENCANA

6 PROGRAM UNGGULAN DAERAH TANGGUH BENCANA

7 PENUTUP

1. PENDAHULUAN

Bencana semakin meningkat baik intensitas maupun frekuensi terjadiannya

Pemahaman Pengurangan Risiko Bencana (PRB) kurang, masih dipahami sebagai tanggap darurat

Banyak masyarakat tinggal di daerah rawan bencana dengan risiko tinggi

Sistem yang ada belum memadai (regulasi, kelembagaan, pendanaan, peningkatan kapasitas dan sebagainya)

Koordinasi dan sinergitas stakeholders belum optimal

Pengurangan risiko bencana belum dijadikan dasar pertimbangan bertindak dalam segala hal, termasuk perencanaan pembangunan

**Bagaimana Kabupaten Rawan Bencana menjadi Daerah Tangguh Bencana?
Apa saja yang harus dilakukan dan difasilitasi kepada masyarakat agar menjadi tangguh bencana?**

2. KONTEKS

KERENTANAN BENCANA DI INDONESIA

Indonesia berada pada posisi pertemuan 3 lempeng bumi yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yg menjadikan Indonesia rawan gempa tektonik

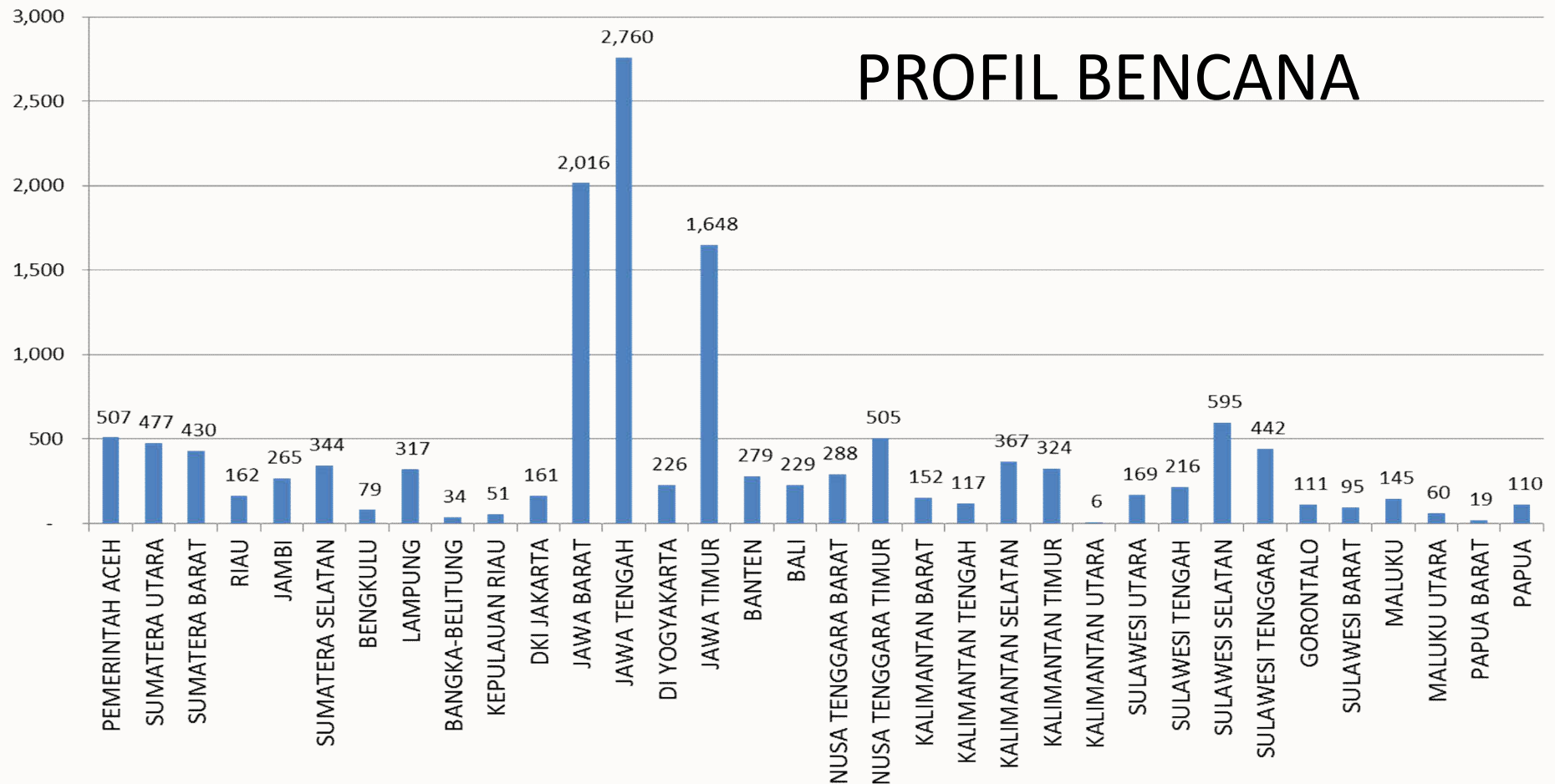
Pertemuan lempeng itu pula menjadikan Indonesia merupakan kawasan gunung berapi yang merupakan bagian dari Cincin Api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*)

Posisi geografis Indonesia berada pada daerah yang ditandai dengan gejolak cuaca dan fluktuasi iklim dinamis

Praktek pengelolaan SDA yg tidak terkendali yg mengancam keseimbangan ekologis

Perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia melalui UU Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007. dari fatalistik-reaktif dan tanggap darurat menuju proaktif dan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan

PROFIL BENCANA

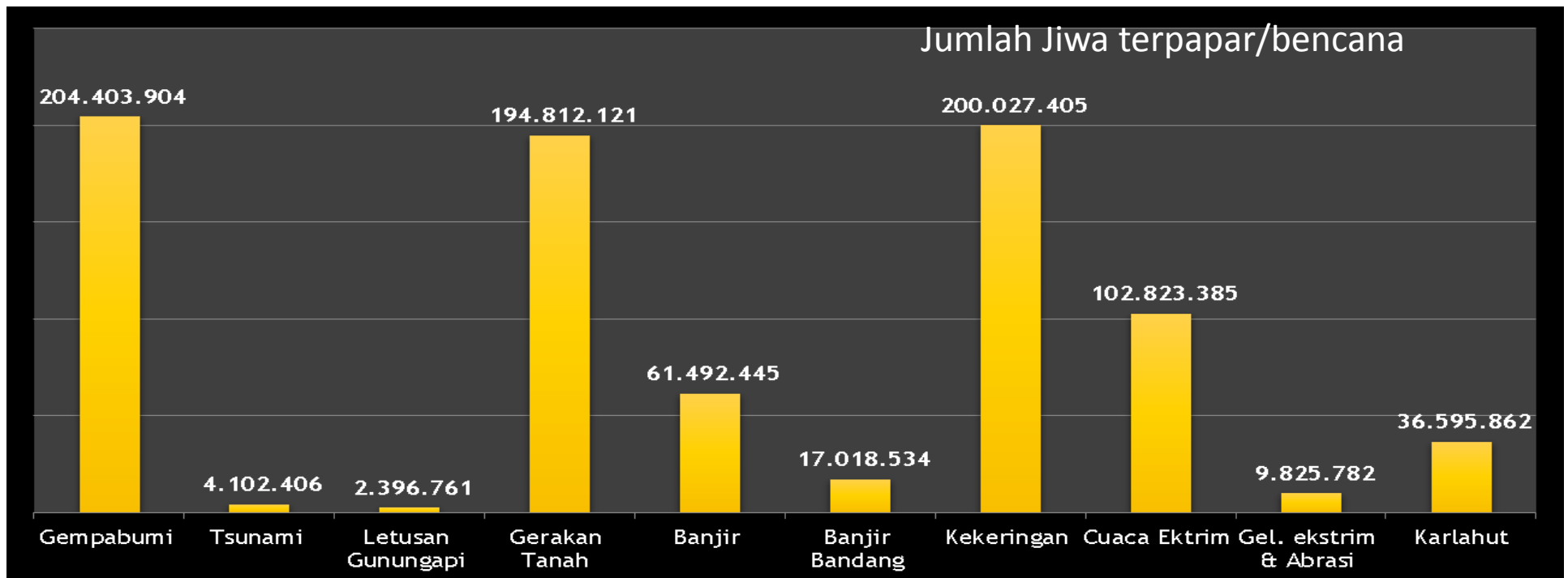


Data dan Informasi Bencana Indonesia, intensitas kejadian bencana cenderung terus meningkat. Tahun 2011 : 91% kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, puting beliung, dan longsor)

Faktor utama penyebab: perubahan iklim global dan degradasi lingkungan akibat ulah manusia (antropogenik).

KERUGIAN AKIBAT BENCANA DI INDONESIA

- 322 Kabupaten/Kota (80%) memiliki Kelas Risiko Bencana TINGGI (IRBI 2013)
- Rata-rata kejadian bencana >1.000 kejadian/tahun (DIBI, 2014)
- Penduduk terancam bencana >200 juta jiwa (Kajian Risiko Bencana, 2011)
- Kerusakan dan kerugian akibat kejadian bencana 2009-2014: Rp81,21 trilyun, kebutuhan pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi: Rp26,32 trilyun (Jitupasna, 2014)



KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2014

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal & Hilang	Menderita & Mengungsi	Kerusakan				
					Rumah		Fasillitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
					RB+RS+RR	Terendam			
					Jiwa		Unit		
1	Banjir	458	87	1,849,631	3,956	421,579	5	37	75
2	Banjir Dan Tanah Longsor	33	47	49,220	1,330	8,104	17	2	1
3	Gelombang Pasang	15	-	3,175	566	284	-	1	1
4	Gempa Bumi	11	-	248	662	-	6	20	39
5	Kebakaran Lahan Dan Hutan	35	3	424,600	92	-	-	-	-
6	Letusan Gunungapi	5	24	128,167	17,833	-	9	37	251
7	Puting Beliung	496	57	10,707	22,929	261	6	64	43
8	Tanah Longsor	413	343	18,918	3,515	74	2	24	11
9	Kekeringan	7	-	169,977	-	-	-	-	-
10	Tsunami	2	-	-	-	-	-	-	-
Total		1,475	561	2,654,643	50,883	430,302	45	185	421

1. Dari 1.475 kejadian bencana telah menyebabkan 561 korban meninggal & hilang, 2,65 juta jiwa menderita dan mengungsi, 50.883 unit rumah rusak, 430 ribu rumah terendam banjir, dan ratusan fasum rusak.
2. 99% kejadian bencana tahun 2014 adalah bencana hidrometeorologi.
3. 61% korban meninggal disebabkan oleh longsor.

Sumber: BAPPENAS

Kerugian Bencana Global

Kerugian akibat bencana global dari kejadian Gempabumi, tsunami, banjir dan badai adalah sekitar US\$ 250 miliar hingga US\$ 300 miliar per tahun (*Global Assesement Report on Disaster Risk Reduction UN, 2015*).

Di 85 negara berkembang, jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat bencana didominasi oleh sebab bencana ekstensif (bencana minor dan periodik). Pada satu dekade terakhir ini, total kerugian di 85 negara berkembang mencapai US\$94 Triliun.

BENCANA ALAM DAN TEKNOLOGI: DUNIA MEREKAM 518 PERISTIWA PADA 2014

Kompas, Sabtu, 26 September 2015

BENCANA ALAM & TEKNOLOGI	AMERIKA	EROPA	ASIA	AFRIKA	OCENIA
BENCANA DI BENUA	108	77	224	98	11
ORANG TERKENA DAMPAK (RIBUAN)	4.546	2.866	92.730	6.762	170
JUMLAH KEMATIAN	1.549	989	8.523	2.585	202

BENCANA ALAM	KEKERINGAN	GEMPA BUMI	SUHU EKSTRIM	BANJIR	TANAH LONGSOR
BENCANA DI BENUA	15	26	17	132	15
ORANG TERKENA DAMPAK (RIBUAN)	39.724	3.182	1.113	36.621	202
JUMLAH KEMATIAN	0	772	1.189	3.199	1.303

BENCANA TEKNOLOGI	BADAI	AKTIVITAS VULKANIK	KEBAKARAN HUTAN	KECELAKAAN INDUSTRI	KECELAKAAN TRANSPORTASI	LAIN-LAIN
BENCANA DI BENUA	99	8	3	27	144	32
ORANG TERKENA DAMPAK (RIBUAN)	25.714	210	12	284	3	9
JUMLAH KEMATIAN	1.383	101	16	878	4.360	646

3. MAPPING INDEKSASI KEBENCANAAN

STATUS RISIKO BENCANA DAERAH BERDASARKAN JENIS ANCAMAN

1. Tingkat risiko bencana Kabupaten/kota di Indonesia terdiri atas 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Seluruh jenis hazard yaitu banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung api, gelombang ekstrim, abrasi, kebakaran, cuaca ekstrim dan kekeringan
2. Data ini menunjukkan bahwa daerah/kabupaten berada dalam ancaman bencana yang serius.

STATUS	JENIS ANCAMAN									
	BANJIR	GEMPA BUMI	TANAH LONGSOR	TSUNAMI	GUNUNG API	GELOMBANG EKSTRIM & ABRASI	KEBAKARAN	CUACA EKSTRIM	KEKERINGAN	
TINGGI	317	337	363	126	53	301	472	75	351	
SEDANG	63	159	134	22	39	12	16	418	142	
RENDAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. JENIS ANCAMAN DAN SPESIFIKASI MENU

NO	ANCAMAN BENCANA DAN PREDIKSI MENU								
	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Tsunami	Gunung Api	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Kebakaran Hutan dan Pemukiman	Cuaca Ekstrem	Kekeringan
STRUKTURAL									
1	Bronjong	Early Warning System	Tanggul Penahan Tebing	Early Warning System	Jalur Evakuasi	Talut/Pemecah Ombak	Pembangunan Sumur di lahan	Early Warning System	Embung
2	Mesin Penyedot Air	Jalur Evakuasi	Jalur Evakuasi	Jalur Evakuasi	Rambu Evakuasi	Early Warning System	Pembangunan Parit (Kanalisisasi)	Shelter	Penanaman bibit pohon sumber air
3	Biopori/Sumur Resapan	Rambu Evakuasi	Rambu Evakuasi	Rambu Evakuasi	Shelter / Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Giant Sea wall	Shelter / Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Pembangunan perlindungan terhadap cuaca ekstrem	Gudang Logistik
4	Drainase	Shelter / Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Early Warning System	Shelter / Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Alat Telekomunikasi	Alat Telekomunikasi	Pembuatan sumur tandon air untuk darurat kebakaran	Early Warning System	Mobil tangki air
5	DAM	Peralatan Simulator Gempa Bumi	Running Logistik	Alat Telekomunikasi	Early Warning System	Perlindungan bangunan/rumah	Running Logistik	Gudang Logistik	Mesin Pompa Air
6	Early Warning System (FEWS)	Running Logistik	Penanaman Pohon	Radio Komunitas	Pembangunan / Normalisasi Jalur aliran lumpur dan lava	Running Logistik	Tabung Oksigen		Alat Sanitasi Hemat Air
7	Normalisasi Sungai / Turap		Shelter / Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Running Logistik	Alat Pemantau Gunung Api	Penanaman Pohon Mangrove / Bakau	Alat Pengukur Polusi Udara		Prasaran daur ulang air
8	Kanalisisasi Sungai		Alat Telekomunikasi		Running Logistik		Pompa Portable		Bendung karet
9	Gudang Logistik						Pembangunan Posko Pemantauan Kebakaran Hutan dan Pemukiman		
10	Bendung						Pembangunan Embung		
11	Penanaman Pohon / Reboisasi								
12	Disaster Kit								
13	Alat Telekomunikasi								
14	Mobile MCK								
15	Life Jacket								11
16	Perahu LCR								
17	Pengadaan Water								

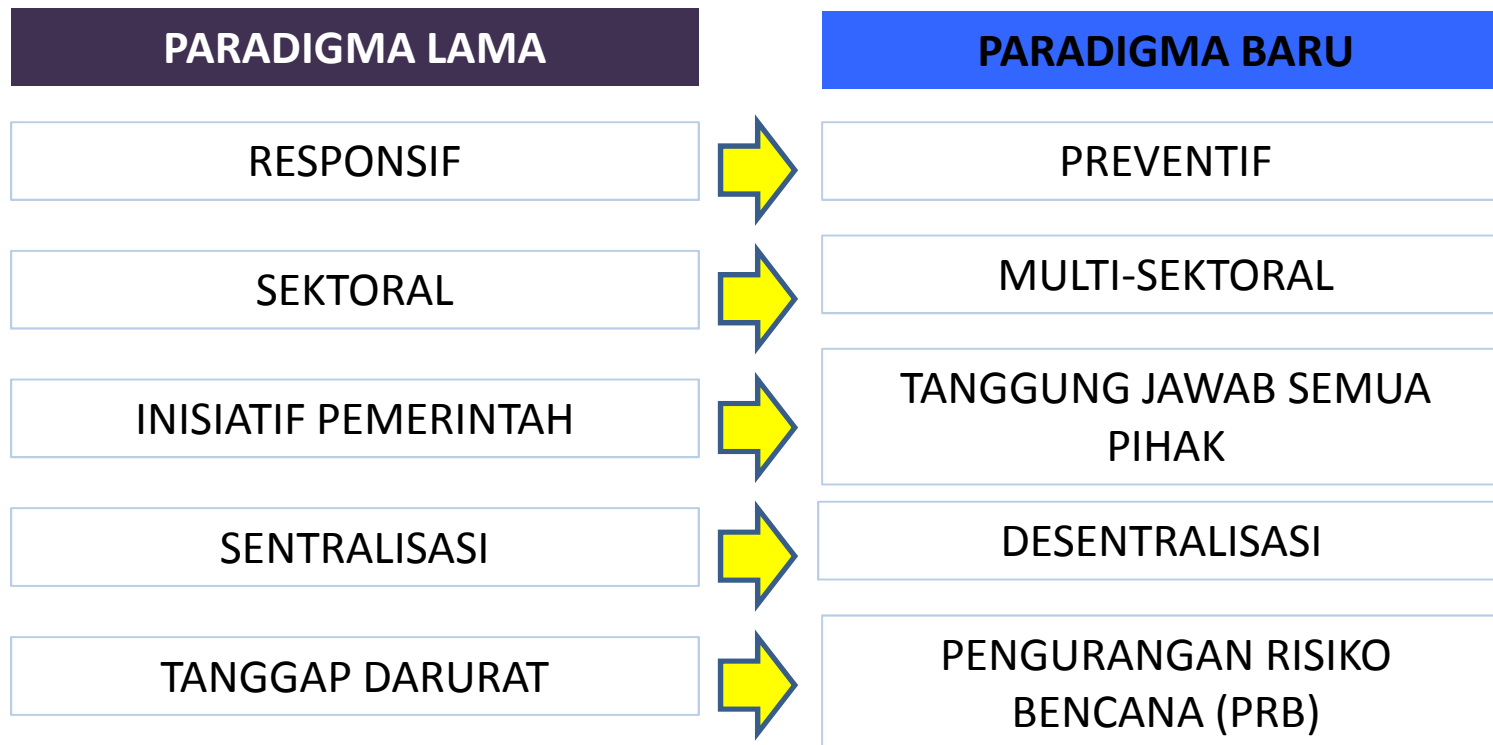
JENIS ANCAMAN DAN SPESIFIKASI MENU

NO	ANCAMAN BENCANA DAN PREDIKSI MENU								
	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Tsunami	Gunung Api	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Kebakaran Hutan dan Pemukiman	Cuaca Ekstrem	Kekeringan
NON STRUKTURAL									
1	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi
2	Pelatihan Kader Siaga Bencana	Pelatihan Kader Siaga Bencana	Pelatihan Kader Siaga Bencana	Pelatihan Kader Siaga Bencana	Pelatihan Kader Siaga Bencana	Pelatihan Kader Siaga Bencana	Pelatihan Kader Siaga Bencana	Pelatihan Kader Siaga Bencana	Pelatihan Kader Siaga Bencana
3	Penguatan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan
4	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan
5	Pendidikan Kebencanaan Terstruktur	Pelatihan Tukang Bangunan Tahan Gempa							
6	Fasilitasi Perencanaan Kontijensi Banjir	Penyuluhan Kebencanaan	Penyuluhan Kebencanaan	Penyuluhan Kebencanaan	Penyuluhan Kebencanaan	Penyuluhan Kebencanaan	Penyuluhan Kebencanaan	Penyuluhan Kebencanaan	Penyuluhan Kebencanaan
7	Simulasi (Gladi Lapang) (Gladi Lapang) Banjir	Fasilitasi Perencanaan Kontijensi Gempa Bumi	Fasilitasi Perencanaan Kontijensi Longsor	Fasilitasi Perencanaan Kontijensi Tsunami	Fasilitasi Perencanaan Kontijensi Erupsi Gunung Api	Fasilitasi Perencanaan Kontijensi Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Fasilitasi Perencanaan Kontijensi Kebakaran Hutan dan Pemukiman	Fasilitasi Perencanaan Kontijensi Cuaca Ekstrem	Fasilitasi Perencanaan Kontijensi Kekeringan
8	Bimtek Livelihood	Simulasi (Gladi Lapang) Gempa Bumi	Simulasi (Gladi Lapang) Longsor	Simulasi (Gladi Lapang) Tsunami	Simulasi (Gladi Lapang) Erupsi Gunung Api	Simulasi (Gladi Lapang) Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Simulasi (Gladi Lapang) Kebakaran Hutan dan Pemukiman	Simulasi (Gladi Lapang) Cuaca Ekstrem	Simulasi (Gladi Lapang) Kekeringan
9	Peta Rawan Bencana	Pendidikan Kebencanaan Terstruktur	Pendidikan Kebencanaan Terstruktur	Pendidikan Kebencanaan Terstruktur	Pendidikan Kebencanaan Terstruktur	Pendidikan Kebencanaan Terstruktur	Pendidikan Kebencanaan Terstruktur	Pendidikan Kebencanaan Terstruktur	Pendidikan Kebencanaan Terstruktur
10		Bimtek Livelihood	Bimtek Livelihood	Bimtek Livelihood	Bimtek Livelihood	Bimtek Livelihood	Bimtek Livelihood	Bimtek Livelihood	Bimtek Livelihood
11		Peta Rawan Bencana	Peta Rawan Bencana	Peta Rawan Bencana	Peta Rawan Bencana	Peta Rawan Bencana	Peta Rawan Bencana	Peta Rawan Bencana	Peta Rawan Bencana

Sumber: TIM TA PDRB/ Peninsula [Pukul 19.30 WIB s.d Selesai, 28 September 2015]

5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA

PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA



PERUBAHAN PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA

SEBELUM

UU 24/2007

- Pra Bencana kurang diperhatikan
- Mengutamakan Penanganan Darurat
- Manajemen PB masih sektoral
- Landasan hukum yang masih kurang
- Belum didukung perencanaan PB dan anggaran
- Pemahaman dan kemampuan pelaku PB yang terbatas

SETELAH

UU 24/2007

- Memperhatikan upaya Pra Bencana, Penanganan Darurat, dan Pemulihan
- Manajemen PB yang terkoordinasi
- Landasan hukum penyelenggaraan PB yang cukup kuat
- Mendorong dokumen perencanaan PB dan anggaran
- Memperhatikan penguatan kapasitas PB yang dibutuhkan

SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA



THE SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015 - 2030

TARGET

1. *Pengurangan yang berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia*
2. *Pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak*
3. *Pengurangan kerugian ekonomi dalam kaitannya dengan GDP dunia*
4. *Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting/kritis dan gangguan pelayanan dasar, termasuk kesehatan dan fasilitas pendidikan*
5. *Penambahan jumlah Negara yang memiliki strategi PRB di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020*
6. *Peningkatan kerjasama Internasional*
7. *Bertambahnya akses pada system peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana dan pengkajian*

PRIORITAS

1. *Pemahaman Risiko Bencana*
2. *Penguatan pengaturan risiko bencana untuk mengelola risiko bencana*
3. *Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan*
4. *Peningkatan kesiapsiagaan bencana untuk response yang lebih baik, dan untuk "pembangunan kembali yang lebih baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi*

PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM PRB



1. Langkah pertama untuk membangun masyarakat tangguh bencana adalah pentingnya pengenalan dalam kebijakan PRB
2. Keterlibatan PRB oleh Pemerintah Dearah, Swasta, Komunitas regional, LSM sangat diperlukan

“NEW DRR PROPOSAL IN INDONESIA”

- **Kurangi Risiko Bencana saat ini
--- IRB**

- Kurangi **Hazard**
- Kurangi **Vulnerability**
- Tingkatkan **Capacity**

- **Cegah terjadinya Risiko
Bencana Baru**

- Geologi
- Perubahan iklim
- Pembangunan

- **Penguatan Ketangguhan
Ekonomi dan Sosial**

- **DRR Knowledge Center**

- Identifikasi Risiko
- Pencegahan
- Mitigasi
- Pengalihan
- Kesiapsiagaan

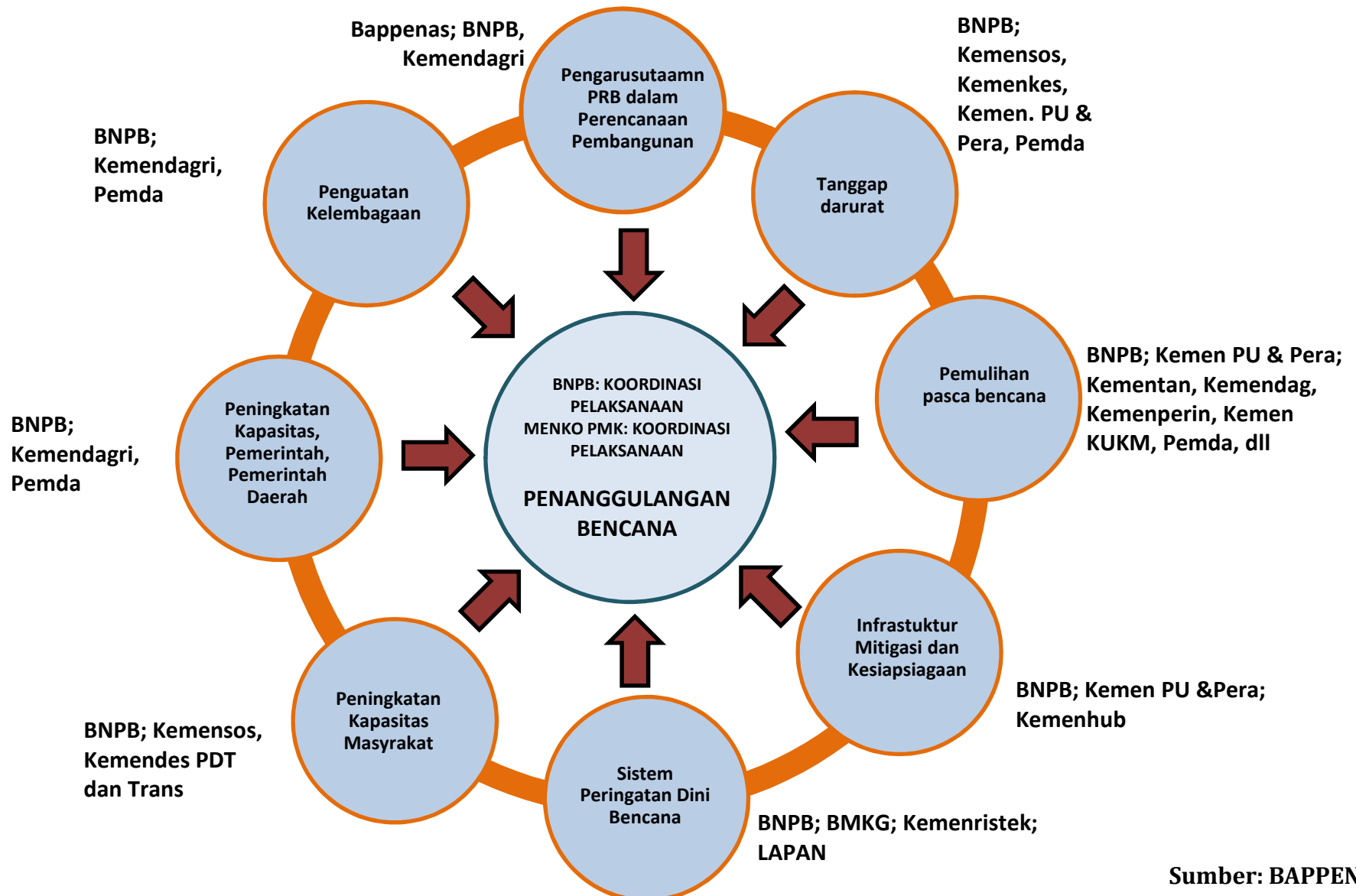
- Sertifikasi Profesi
- Standarisasi PB
- IPTEK PB

- Tata Ruang
- Gerakan PRB

- Resilient City
- Resilient Village
- Sekolah/Madrasah Aman Bencana
- Rumah Sakit Aman Bencana

- Database
- Metodologi
- Venue
- Sumberdaya Manusia
- Politik “soft diplomacy”

INTEGRASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PEMBANGUNAN



**6. PROGRAM PENGUATAN DAERAH
TANGGUH BENCANA
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI**

GAMBARAN UMUM PROGRAM UNGGULAN DTB DAN ISU STRATEGIS TERKAIT

Program Unggulan Daerah Tangguh Bencana (DTB) merupakan program yang di-*introduced* tahun 2015 ini sebagai program unggulan Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana untuk mengefektifkan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB).

DTB adalah ***payung*** kegiatan PRB yang **tidak mereplikasi kegiatan BNPB maupun K/L, namun sebagai penguatan.**

DTB mengkonsolidasikan kegiatan PRB yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Lokus DTB adalah daerah kabupaten/kota rawan bencana.

GAMBARAN UMUM PROGRAM UNGGULAN DAERAH TANGGUH BENCANA

MAKRO

DAERAH TANGGUH BENCANA

MEZO

SINKRONISASI

KOORDINASI

KONSOLIDASI

Desa Tangguh Bencana (BNPB), Program Desa Pesisir Tangguh (Kemen KKP), Desa Siaga (Kemen Kesehatan), Kampung Siaga Tangguh (Kemen Sosial), Program Kampung Iklim (Kementrian KLH), Desa Mandiri Pangan (Kementrian Pertanian), Desa Mandiri Energi (Kementrian ESDM), Desa Wisata (Kementrian Pariwisata), PNPM Mandiri Pedesaan (Kementrian PU), One village one product (Kementrian Koperasi dan UKM), dll. program dari lembaga usaha, lembaga internasional maupun NGO lokal dan Internasional

MIKRO

GAMBARAN UMUM PROGRAM UNGGULAN DAERAH TANGGUH BENCANA

Program Unggulan Daerah Tangguh Bencana harus mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan program pengurangan risiko bencana yang ada di daerah.

Pendekatan Struktural dan Kultural harus seimbang. Perlu diupayakan program yang aspiratif dan *bottom-up*.

Komitmen APBD sangat didorong untuk memperkuat DTB dalam pengurangan risiko bencana pada kawasan rawan bencana

Untuk memperkuat Program Unggulan DTB diperlukan penyusunan database, profil dan roadmap PRB pada kawasan rawan bencana yang jelas dan terarah.

PENGERTIAN DAERAH TANGGUH BENCANA

Daerah Tangguh Bencana adalah ***penguatan daerah*** untuk memiliki kemampuan mandiri dan beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana melalui pengarusutamaan (*mainstreaming*) pada **aspek regulasi, penguatan institusional, infrastruktur, sumber daya manusia dan ekonomi** sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

TUJUAN DAERAH TANGGUH BENCANA



RUANG LINGKUP

DAERAH TANGGUH BENCANA



Ruang Lingkup Daerah Tangguh Bencana adalah penguatan pada lima dimensi: Penguatan **Regulasi**, Penguatan **Institusional**, Penguatan **Infrastruktur**, Penguatan **Sumber Daya Manusia** dan Pengembangan **Ekonomi**.

INDIKATOR DAERAH TANGGUH BENCANA

DIMENSI	INDIKATOR
(1) REGULASI	• Daerah memiliki RPJMD yang visioner terhadap masalah pengurangan risiko bencana; • Daerah memiliki APBD yang melaksanakan program pengurangan risiko bencana; • Daerah memiliki Perda program pengurangan risiko bencana; • Adanya Perbup yang menetapkan lokasi rawan bencana; • Adanya Perbup yang menetapkan, mengatur kewenangan, dan fungsi komite/ forum/ organisasi PRB;
(2). INSTITUTIONAL	• Adanya forum PRB daerah yang merupakan representasi dari kelompok/golongan yang ada di daerah; • Adanya kelompok-kelompok relawan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana; • Adanya pengarusutamaan PRB dalam kegiatan kelompok sosial, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga/kantor swasta. • Adanya kelompok warga atau insitusi sosial yang berperan menjadi mediator kerjasama lintas daerah dalam pengurangan risiko bencana

INDIKATOR DAERAH TANGGUH BENCANA

DIMENSI	INDIKATOR
(3). INFRASTRUKTUR	• Adanya alat peringatan dini (<i>Early Warning System</i>) sesuai jenis potensi bencana; • Adanya peta jalur evakuasi; • Adanya jalur evakuasi; • Adanya tempat evakuasi; • Tersedianya sarana dan prasarana penunjang sesuai jenis potensi bencana.
(4). SUMBER DAYA MANUSIA	• Adanya pelatihan tentang ancaman, kerentanan, dan risiko bencana; • Adanya pelatihan mengenai siaga bencana, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana bagi • Adanya pelatihan untuk ketrampilan menyelamatkan properti/fasilitas-fasilitas penting ketika terjadi bencana; • Adanya pelatihan untuk memiliki kemampuan memadai tentang perencanaan pembangunan secara partisipatif; • Adanya pengetahuan dan tradisi untuk mengamati gejala-gejala alam penanda kebencanaan.
(5). EKONOMI	• Ada kegiatan usaha <i>income-generating</i>. • Ada akses modal pengalihan pencaharian terutama bagi kelompok rentan; • Adanya akses ke lembaga-lembaga keuangan.

7. PENUTUP

1. Untuk menuju daerah yang tangguh menghadapi bencana harus paham risiko, tahu bagaimana mengelola, dilaksanakan secara terencana, terpadu dan menyeluruh dan melibatkan semua pihak, karena bencana kompleks dan multi disiplin/sektor;
2. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, mencoba memperkuat program pengurangan risiko bencana (PRB) melalui PROGRAM UNGGULAN **Daerah Tangguh Bencana**;
3. Semua pihak harus terlibat dalam program unggulan Daerah Tangguh Bencana karena sifat bencana yang sangat kompleks dan memerlukan keterlibatan multi pihak, melalui pendekatan pengurangan risiko bencana koordinatif dan komprehensif;
4. Sifat bencana adalah lokalitas, sehingga membutuhkan proses identifikasi dan analisis kebutuhan yang komprehensif dan spesifik, sehingga intervensinya tepat;
5. Pengurangan risiko bencana melibatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan aspiratif dan partisipatif, dengan memperhatikan *local wisdom*;
6. Pengurangan risiko bencana harus seimbang antara pendekatan struktural dan pendekatan kultural;
7. Dalam perencanaan Program Unggulan Daerah Tangguh Bencana, harus disusun database, profil dan roadmap pengurangan risiko bencana yang jelas dan terarah.

Terima Kasih, . .
Salam Daerah Tangguh Bencana!